

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran sejarah yang dilaksanakan sesungguhnya untuk menceritakan pengalaman yang diwariskan oleh generasi terdahulu dan dapat memainkan perannya untuk membekali siswa tentang pemahaman mengenai nilai-nilai moral kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme, melatih intelektual siswa mengenai pengalaman bangsa, dan pembelajaran sejarah dapat membentuk jati diri bangsa serta pembinaan dalam pembangunan bangsa (*nation and character bulding*).

Pembelajaran sejarah yang diajarkan di tingkat sekolah (SMP/SMA) pada umumnya adalah penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa yang didasarkan pada buku paket terutama proses pembelajaran yang terjadi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sejarah yang diajarkan berupa sejarah perjuangan bangsa Indonesia daerah lain atau peristiwa-peristiwa yang terjadi seluruh tanah Jawa (*berisifat Jawa centris*) tanpa mempertimbangkan keadaan tempat dimana guru itu mengajar dan guru berperan sebagai pusat kegiatan belajar dan siswa sebagai peserta pasif yang selalu mendengar, diperintah untuk menerima materi dari guru. Dalam posisinya sebagai penyampai materi pembelajaran guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat implementasi di ruang kelas kurang peka terhadap perkembangan masyarakat sehingga materi pembelajaran sering kali lepas dari konteks dan situasi nyata dalam lingkungan sosial siswa (Somantri, 2001).

Diharapkan seorang guru sejarah yang menguasai bidang studi yang akan diajarkannya dapat memiliki ketrampilan dalam mengembangkan pembelajaran, memahami sejarah sebagai ilmu dan bagian dari disiplin ilmu sosial, memiliki kemampuan berpikir yang komprehensif dan interdisipliner, kemampuan membaca fenomena sosial kontemporer serta interes untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya, dapat mengkaitkan antara pokok bahasan sejarah sesuai dengan jamannya dengan masalah-masalah sosial kontemporer (Supriatna, 2007:93).

Winenburg (2008:16) menilai selama ini sejarah yang diajarkan sekolah kurang bermakna bagi siswa. Ironis sekali, siswa diajak untuk mempelajari asal-usul daerah lain, namun tidak memahami asal-usul daerahnya sendiri. Disisi lain juga muncul persoalan yang terkait dengan kecurigaan dari kelompok tertentu yang merasa tidak diuntungkan dalam kurikulum.

Oleh karena itu, perlu sekali merubah paradigma dalam pembelajaran sejarah yang dapat memberikan stimulus siswa untuk mempelajari sejarah, diantaranya siswa dibawah untuk mampu mempararelkan sejarah nasional dan dunia ke dalam lingkungan kehidupannya dengan metode yang inovatif dan bervariasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu: *pertama*; pengorganisasian bahan pembelajaran, *kedua*, mengintegrasikan materi sejarah, *ketiga*; mengembangkan dan menggunakan konsep-konsep sejarah atau ilmu sosial lainnya yang relevan dengan konsep disiplin sejarah, *keempat*; menggunakan dan mengembangkan teori-teori tertentu dalam sejarah, dan

kelima; menggunakan pendekatan yang menekankan pada siswa dalam proses pembelajaran, misalnya *inquiri* dan *cooperative learning* (Supriatna, 2007:67-70).

Dalam buku *Historiografi di Indonesia* yang ditulis oleh Agus Mulyana dan Darmiasti bahwa pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran yang tujuannya memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsa. Tujuan yang demikian membuat tujuan pelajaran Sejarah akan berkaitan dengan ideologi politik kenegaraan. Negara sering memandang bahwa pembentukan watak kebangsaan warganya merupakan kewajiban negara . Kewajiban itu kemudian dilakukan melalui pendidikan diantaranya dilakukan dalam mata pelajaran sejarah. Dengan demikian, tujuan pelajaran sejarah menjadi ideologis. Pada sisi lain sejarah di sekolah adalah sejarah sebagai ilmu (2009:79).

Untuk menjadi seorang guru sejarah yang ideal dan profesional, Sjamsuddin (1996: 68-69) dalam Dadang Supardan menjelaskan bahwa harus memiliki beberapa kemampuan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan praktis dalam mengartikulasi dan mengekspresikan pengetahuannya secara menarik, baik secara tertulis maupun lisan.
2. Kecakapan membaca dan/atau berbicara dalam satu atau dua bahasa asing atau daerah.
3. Menguasai satu atau lebih disiplin kedua, terutama ilmu-ilmu sosial lain, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*), seperti filsafat, seni atau sastra, bahkan kalau mungkin relevan juga yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam.

4. Kelengkapan dalam penggunaan pemahaman (*insight*) psikologi, kemampuan imajinasi, dan empati.
5. Kemampuan membedakan antara profesi sejarah dan sekedar hobi antikurian, yaitu pengumpulan benda-benda antik.
6. Pendidikan yang luas (*broad culture*) selama hidup sejak dari masa kecil.
7. Dedikasi pada profesi dan integritas pribadi, baik sebagai sejarawan peneliti maupun sebagai sejarawan pendidik (2008:307).

Upaya pengembangan pendidikan mata pelajaran sejarah merupakan tanggung jawab seorang guru sejarah dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah. Guru sejarah diharapkan mampu melaksanakan pengajaran pendidikan sejarah nasional yang disesuaikan dengan lingkungan dimana ia mengajar dengan memperhatikan tujuan, materi, metode, sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan rasa nasionalisme di dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya nilai-nilai kesejarahan daerah merupakan modal dasar dalam penguatan kehidupan berbangsa. Untuk itu kemampuan guru sejarah dalam pembelajaran sejarah diharapkan dapat mentransformasikan dengan baik kepada siswa. Seperti yang ditegaskan oleh Notosusanto bahwa:

“Pada dewasa ini telah hadir suatu generasi yang bukan saja tidak mengalami zaman penjajahan atau zaman pergerakan nasional, melainkan juga lahir sesudah selesainya perang kemerdekaan. Mereka yang lahir tahun 1950 sekarang sudah berusia ...? Jadi sudah mencapai kematangan penuh sebagai manusia. Satu-satu penghubung antara mereka dengan tahun-tahun formatif bangsa kita. Setengah abad yang lalu adalah sejarah. Jika sejarah tidak sampai pada mereka, haruslah kita perhitungkan bahwa mereka akan memperoleh presepsi yang tidak benar mengenai anteseden bagi masa kini seperti sekarang ini bentuknya. Dari

ketidak mengertian itu akan tumbuh miskonsepsi, dan dari miskonsepsi mudah timbul frustrasi” (I Gde Widja, 1991: 162).

Bertolak dari pemikiran Notosusanto diatas bahwa pembelajaran mata pelajaran Sejarah di Kabupaten Fakfak dengan otonomisasi pendidikan (otonomi khusus) seorang guru sejarah harus mampu secara profesional dalam mengembangkan pengajaran Sejarah. Sebagaimana Wiriaatmadja (2009:17) menjelaskan bahwa “kemampuan guru Sejarah untuk melakukan variasi dalam strategi belajar mengajarnya, melatih dirinya untuk melakukan peran sebagai fasilitator, mediator, dan evaluator dalam proses pembelajaran yang berhasil membangun suasana yang demokratis, sedangkan untuk siswa diharapkan terjadi perubahan pandangan siswa terhadap pelajaran sejarah melalui model-model pembelajaran yang berbeda mereka mulai memainkan peranan yang lebih efektif, melihat adanya hubungan antara pelajaran masa lalu dengan kehidupan mereka sendiri, dan bahwa dengan memiliki berbagai ketrampilan dalam menghadapi atau mengembangkan ketrampilan pengambilan keputusan, para siswa harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka terlebih dahulu.”

Fakfak adalah salah satu pemerintahan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat dalam sistem administrasi merupakan kabupaten tertua di tanah Papua, terdiri dari sembilan Distrik (kecamatan) yang sedang melakukan percepatan pembangunan disegala bidang. Bidang pendidikan merupakan prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-Undang.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan Undang-Undang yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada masyarakat Papua, khususnya

Kabupaten Fakfak untuk menjalankan kewenangan mengatur pemerintahan sendiri (desentralisasi) secara khusus. Dengan kewenangan khusus dari pemerintahan pusat ini Kabupaten Fakfak mulai mengadakan percepatan melakukan perubahan pembangunan segala bidang.

Ketertinggalan selama ini dirasakan di Kabupaten Fakfak dikarenakan aspirasi pembangunan dilaksanakan berdasarkan keinginan sentralistik sehingga mengakibatkan kesenjangan yang terlalu luas dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan saat ini di Kabupaten Fakfak, pembangunan pendidikan dengan didukung anggaran pembangunan pendidikan berdasarkan amanah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dimana sekurang-kurangnya 30% anggaran pembangunan daerah diperuntukkan pada bidang pendidikan sebagai percepatan pembangunan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Percepatan pembangunan pendidikan pada saat ini harus dapat diimbangi dengan kemampuan nilai, sikap loyalitas terhadap bangsa terutama daerah dimana kita berada sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai perasaan nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun Papua lebih khusus Kabupaten Fakfak untuk membentuk manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya mencapai masyarakat adil dan makmur yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring bergulirnya reformasi Indonesia pada tahun 1998, berawal krisis ekonomi (moneter) dan moral akhirnya diikuti dengan krisis multi dimensional diberbagai bidang yang berdampak dengan mundurnya Presiden Soerharto pada

tanggal 21 Mei 1998. Ancaman dis-integrasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia tampaknya terkait dengan proses demokratisasi yang semakin terbuka dan liberal. Ikatan primordial seperti kesukuan, keagamaan, antar golongan telah dijadikan motif-motif yang mewarnai konflik kepentingan yang menimbulkan kerusuhan dan instabilitas. Gerakan separatisme yang sejak rezim pemerintahan orde baru lahir justeru semakin inten melakukan provokatif.

Kongres rakyat Papua II tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000 untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan rakyat Papua memperjuangkan kemerdekaan karena selama ini hidup dalam trauma eksploitasi dan penindasan. Persolan-persoalan yang mencolok adalah hak asasi manusia dan eksploitasi kekayaan alam tanpa mempertimbangkan asas keadilan. Selama ini kekayaan alam diambil sementara membangun Papua sangat tidak berimbang (minim) tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat Papua.

Pada dasarnya status hukum Papua sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah final. Perubahan resim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soeharto kepada Presiden Baharuddin Jusuf Habibie menandai awal masa peralihan dari negara otoriter ke negara demokrasi. Sementara sebagian besar elit kota Jakarta berbicara reformasi (dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan), sedangkan bagian terbesar elit Papua berbicara kemerdekaan Papua. Berbeda dengan taktik gerilya dan pemberontakan bersenjata yang dijalankan Organisasi Papua Merdeka, tokoh-tokoh intelektual, agama, dan adat Papua mendorong dialog damai dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pemerintah Habibie mendorong dialog

sebagai bagian dari pendekatan yang digunakan pemerintahan baru yang demokratis itu, tetapi menolak ide kemerdekaan Papua. Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid juga mengizinkan pengungkapan sentimen-sentimen Papua secara relatif. Ketika situasi Papua memburuk, dan banyak politisi Jakarta dan militer mulai mengecam pendekatan terbuka yang dijalankan Abdulrahman Wahid, Abdulrahman Wahid mengusulkan status otonomi khusus bagi masyarakat Papua sebagai alternatif bagi kemerdekaan.

Presiden Megawati Soekarnoputri melaksanakan status otonomi khusus untuk provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otonomi Khusus Papua menjadi alternatif jawaban permasalahan yang terjadi di tanah Papua untuk mengejar ketertinggalan yang dirasakan dalam pembangunan disegala bidang. Dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diharapkan dapat membangun masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.

Undang-undang Otonomi Khusus ini merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Pasal 1 ayat b). Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Otsus, 2001:3).

Untuk menghubungkan dengan tujuan yang akan dicapai dalam Undang-Undang Otonomi Khusus hanya dapat dilakukan salah satunya melalui dunia pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan hasil yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan utuh mengenai konsep kebangsaan. Hal tersebut sangat *urgen* bagi masa depan bangsa dan negara sebab apabila siswa tidak memiliki hal tersebut, dipastikan krisis dis-integrasi dan krisis multidimensional yang hingga kini berkecamuk serta meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berulang dimasa yang akan datang.

Pendidikan selain merupakan sebagai wadah untuk menuntut ilmu pengetahuan, pendidikan juga merupakan tempat menggodok dan menyiapkan generasi bangsa dan calon pemimpin bangsa. Seperti pendapat Rusli Karim (1991:31), pendidikan sesungguhnya bertugas menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat dimasa datang.

Untuk dapat menumbuhkan nasionalisme siswa dalam pembelajaran sejarah salah satunya adalah model *problem based learning* (pembelajaran berbasis masalah). *Problem based learning* adalah suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, belajar secara mandiri, dan menuntut ketrampilan berpartisipasi dalam tim. Proses pemecahan masalah dilakukan secara kolaboratif dan disesuaikan dengan kehidupan. Sementara itu, Bout & Feletti (1991) dalam Rusman (2010:246) mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan kearah penataan pembelajaran yang melibatkan para peserta didik untuk menghadapi permasalahan melalui praktik nyata sensual dengan kehidupan sehari-hari.

Margetson (1994) dalam Rusman (2010:246) mengemukakan bahwa kurikulum pembelajaran berbasis masalah membantu untuk meningkatkan perkembangan ketrampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif. Kurikulum pembelajaran berbasis masalah memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok dan ketrampilan interpersonal dengan lebih baik dibanding dengan pendekatan yang lain.

Dengan pembelajaran berbasis masalah diharapkan agar :

1. Para siswa dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan proses belajar secara mandiri. Prinsip-prinsip “mempelajari” seperti seperti ini tidak bisa dilayani melalui ‘pembelajaran’ tradisional yang banyak menekankan pada kemampuan menghafal apalagi pembelajaran sejarah yang diperhadapkan pada angka-angka tahun dan para pahlawan yang membuat pelajaran sejarah menjadi gersang atau kering tanpa bermakna.
2. Para siswa diperlakukan sebagai insan yang dewasa. Perlakuan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan mengimplementasikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada (Tan, 2000). Sebagaimana keinginan masyarakat dunia ingin melakukan penyatuan sendi-sendi kehidupan dalam berbagai bidang tanpa

batasan kenegaraan. Namun, yang dialami bangsa Indonesia adalah kebanggaan kedaerahan yang berlebihan sehingga menuntut negara (pemerintah) untuk melakukan langkah-langkah proatif dalam membangun kesadaran nasionalisme kembali sehingga tidak terjadi dis-integrasi bangsa.

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran sebagai penghubung didalam pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan nasionalisme siswa. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan menjadi *starting point* dalam belajar;
2. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur;
3. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (*multiple perspective*);
4. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar;
5. Belajar pengarahannya menjadi hal yang utama;
6. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran berbasis masalah;
7. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif;
8. Pengembangan ketrampilan inkuiri dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan;

9. Keterbukaan proses dalam proses belajar mengajar meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar; dan
10. Proses Belajar Mengajar melibatkan evaluasi dan *review* pengalaman siswa dalam proses belajar (Rusman, 2010:248).

Dimana kata “pembelajaran” itu sendiri merupakan terjemahan dari “*instruction*”, yang banyak dipakai dalam pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik, yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio, dan lain sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam belajar mengajar.

Hal ini seperti yang diungkapkan Gagne dalam Sanjaya (2006:100) yang menyatakan bahwa, “*Instruction is a set of event that effect learners in such a way that learning is facilitated.*” Oleh karena itu menurut Gagne, mengajar atau *teaching* merupakan bagian dari pembelajaran (*instruction*), dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai sumber dari fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu.

Mengajar adalah suatu aktivitas yang dapat membuat siswa belajar. Keterkaitan antara mengajar dan belajardi istilahkan Dewey sebagai “menjual dan

membeli” (*Teaching is to Learning as Selling is to Buying*).” Artinya, seseorang tidak mungkin akan menjual manakala tidak ada orang yang membeli, yang berarti tak akan ada perbuatan mengajar manakala tidak membuat seseorang belajar. Dengan demikian, dalam istilah mengajar juga terkandung proses belajar siswa. Inilah makna pembelajaran.

Untuk itu pembangunan pendidikan dapat terlaksana apabila segala proses pembelajaran dan unsur-unsur utama pada penyelenggaraan pendidikan yaitu guru, siswa, kurikulum pendidikan, alat peraga dan alat pelajaran, berbagai fasilitas fisik prasarana dan sarana pendidikan serta peraturan perundangan yang menjadi pedoman. Salah satu unsur penting adalah guru, guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru yang baik adalah guru yang mampu menguasai bahan pelajaran, strategi belajar mengajar, dan dapat mendorong siswa untuk meraih prestasi.

Guru harus mampu menghadapi tantangan perubahan terutama perubahan-perubahan terhadap kurikulum seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang digunakan sebagai rujukan oleh para pengembang ditingkat satuan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang disusun oleh Badan Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (BSNP), yang diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL), harus dijadikan salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan; sekolah satu persepsi KTSP adalah pengembangan berbasis Kurikulum Berbasis Sekolah (KBS). KBS mengalami makna bahwa pemberdayaan daerah dan sekolah dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta menilai proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan serta daerah dimana sekolah itu berada.

KTSP lahir dari semangat otonomi daerah (daerah khusus), dimana urusan pendidikan tidak semuanya tanggung jawab pusat, akan tetapi sebagian menjadi tanggung jawab daerah, oleh sebab itu dilihat dari pola atau model pengembangan KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralistik.

Upaya pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomisasi adalah untuk melakukan desentralisasi dan otonomisasi penyelenggaraan pendidikan. Implikasi kebijakan tersebut adalah menguatnya peran aktif dan berpartisipasi pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Tilaar (2005), desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan untuk:

1. pembangunan masyarakat demokrasi;
2. pengembangan sosial kapital; dan
3. peningkatan daya saing bangsa.

Keharusan pemberlakuan desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu sesuai dengan tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman. Sebagaimana Sam T M. Chan dan Tuti T. Sam (2005) bahwa aktualisasi pendidikan nasional yang baru mengisyaratkan adanya tanggungjawab pendidikan tidak hanya dipikul oleh pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Sedangkan Dede

Rosyada mengemukakan bahwa dua paradigma baru dalam pendidikan saat ini adalah adanya otonomisasi dan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan. Otonomisasi mendorong kepala sekolah dan guru memiliki tanggungjawab yang lebih besar terhadap kualitas hasil pembelajaran. Pemerintah berperan dalam hal ini adalah memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana prasarana, ketenagaan, maupun program pembelajaran yang telah direncanakan sekolah, sedangkan demokratisasi adalah memperbesar peran dan partisipasi masyarakat dalam penguatan pendidikan.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang pada saat ini menempati posisi sebagai sekolah umum berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dimana madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, meskipun madrasah berada dibawah Kementerian Agama, namun karena merupakan sub sistem pendidikan nasional dan sekaligus bagian integral dalam sistem pendidikan nasional, maka sebenarnya masuk dalam pendidikan dengan manajemen pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena posisi tersebut, pemerintah daerah seharusnya memberikan perlakuan yang sama tanpa ada dikotomi pemberdayaan baik dalam memberikan fasilitas, sarana prasaran, pendanaan, maupun pengembangan ketenagaan dengan tidak membedakan antara sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun madrasah dan antara sekolah negeri maupun swasta.

Indonesia merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari berbagai suku yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

berbahasa nasional bahasa Indonesia. Melalatoa menghimpun tidak kurang dari 520 suku bangsa Indonesia dengan berbagai kebudayaannya masing-masing. Jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti cita-cita masa depan yang sama berdasarkan pengalaman sejarah. Dalam pembinaan jati diri bangsa Indonesia harus dibina terus menerus tanpa henti dan dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal. Melalui jalur formal jati diri bangsa Indonesia dikembangkan melalui pendidikan (Tilaar, 2007: 32).

Nasionalisme akan tampak didalam kenyataan apabila rakyat biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sendiri sebagai anggota dari suatu komunitas yang abstrak. Inilah yang dimaksud oleh Benedict Anderson, *Imagined Community* (1993) yaitu merasa suatu bagian dari komunitas yang digambarkan berupa keanggotaan seseorang terhadap komunitas bangsanya. Bangsa yang menggambarkan adanya suatu *imagined communities* menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa didalam satu kesatuan. Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasional, Sebagaimana Ernest Renan mengatakan bahwa manusia bukanlah budak dari rasa atau bangsanya juga oleh agama atau oleh faktor-faktor geografis seperti sungai atau pergunungan. Komunitas manusia yang besar yang sehat dalam akal nya dan hangat didalam hatinya membentuk kesadaran moral yaitu membentuk suatu bangsa. Sepanjang kesadaran tersebut menyatakan diri didalam kekuatan untuk berkorban yaitu pengabdian seseorang individu untuk kepentingan umum, sepanjang itulah legitimasi akan hak hidupnya suatu bangsa (Tilaar, 2007: 30).

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini hanya dititik beratkan pada kemampuan guru sejarah dalam pembelajaran sejarah pada Era Otonomi Khusus Papua untuk menumbuhkan nasionalisme siswa, dengan judul **“Pembelajaran Sejarah Dengan Model *Problem Based Learning* Pada Era Otonomi Khusus Dalam Menumbuhkan Nasionalisme Siswa Di Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat”** (Penelitian Tindakan kelas di Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat).

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Proses pembelajaran Sejarah sebelum diterapkan model *problem based learning* pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasionalisme siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
2. Perencanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
3. Pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
4. Penilaian pembelajaran Sejarah yang dilakukan dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

5. Perubahan yang ditunjukkan siswa Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat setelah mengikuti pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning*.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut “apakah pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasionalisme siswa Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak?”

Dari fokus penelitian tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembelajaran Sejarah sebelum diterapkan model *problem based learning* pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasionalisme siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Neger Fakfak?
2. Bagaimana perencanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat?
4. Bagaimana penilaian pembelajaran Sejarah yang dilakukan dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat?

5. Bagaimana perubahan yang ditunjukkan siswa Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat setelah mengikuti pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning*?

D. Penjelasan Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat dua konsep utama, yakni menumbuhkan nasionalisme siswa pada era otonomi khusus dan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning*. Penjelasan konsep utama akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan nasionalisme siswa pada era otonomi khusus

Menumbuhkan nasionalisme adalah harapan untuk selalu mempertahankan terbentuknya suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam ragam budaya, ras, suku, agama, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Persamaan nasib, keinginan dan cita-cita mempersatukan kelompok masyarakat untuk menjadi satu bangsa dalam membentuk negara, yang diyakini dapat melindungi, menampung dan mewujudkan tujuan cita-cita bangsa.

2. Pembelajaran sejarah dengan model *problem based learning*

Problem based learning (pembelajaran berbasis masalah) adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak (*starting point*) pembelajaran. Masalah tersebut adalah masalah yang memenuhi konteks dunia nyata baik yang ada didalam buku teks maupun dari sumber lain seperti peristiwa yang terjadi didalam lingkungan sekitar, peristiwa dalam keluarga atau kemasyarakatan untuk belajar tentang berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan

masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.

E. Tujuan penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* untuk menumbuhkan nasionalisme siswa pada era otonomi khusus di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pembelajaran Sejarah sebelum diterapkan model *problem based learning* pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasionalisme siswa kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
2. Mengetahui perencanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
3. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
4. Mengetahui penilaian pembelajaran Sejarah yang dilakukan dengan model *problem based learning* dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

5. Mengetahui perubahan yang ditunjukkan siswa Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat setelah mengikuti pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning*.

F. Manfaat Penelitian

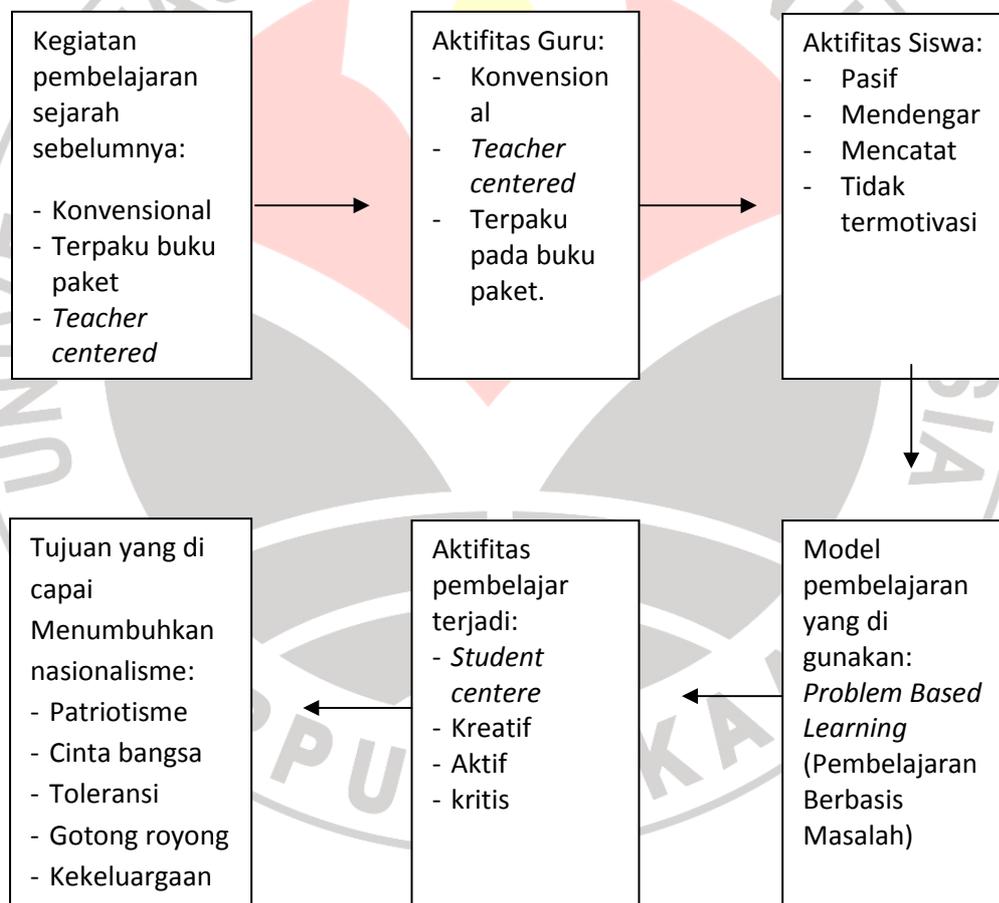
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini akan menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan pengembangan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* implikasinya untuk menumbuhkan nasionalisme siswa pada era otonomi khusus Papua sebagai warga masyarakat dan warga negara.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Para akademisi, khususnya guru Sejarah, diharapkan dapat mengaplikasikan *problem based learning* sebagai salah satu alternatif untuk menumbuhkan nasionalisme siswa.
2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman baru dalam mempelajari Sejarah dengan model *problem based learning* untuk menumbuhkan nasionalisme siswa.
3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan pembelajaran Sejarah dengan model *problem based learning* di sekolah yang bersangkutan.

G. Paradigma Penelitian

Penelitian pada pembelajaran Sejarah dengan menggunakan model *problem based learning* untuk menumbuhkan nasionalisme siswa ini memerlukan suatu kerangka pemikiran atau paradigma yang akan menuntun penulis dalam melaksanakan penelitian yang digambarkan pada gambar 1.1. dibawah ini sebagai berikut berikut:



Gambar 1.1. Paradigma Penelitian.